

**LAPORAN KEUANGAN
UAPPA-E1/UNIT ORGANISASI**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

<Eselon 1> adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan <Eselon 1> mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilal akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada <Eselon 1>. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka UO,

Nama Penandatanganan

.....

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Telah Direviu
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
I. Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca
III. Laporan Operasional
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
F. Pengungkapan Penting Lainnya
VI. Lampiran dan Daftar

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN <ESELON 1>
TAHUN 2xx1**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan <Eselon 1> untuk tahun anggaran 2xx1 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2xx1/31 Desember 2xx1, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen (Eselon I).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

<Jabatan penandatanganan
pernyataan reviu>,

Nama Penandatanganan

.....

< ESELON 1 >

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat Eselon 1 selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2xx1 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka UO,

Nama Penandatanganan

.....

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan <Eselon 1> Tahun 2xx1 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2xx1.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2xx1 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.440.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2xx1 adalah sebesar Rp61.100.000.000 atau mencapai 98,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp62.200.000.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2xx1.

Nilai Aset per 31 Desember 2xx1 dicatat dan disajikan sebesar Rp65.137.000.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp7.155.000.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp56.568.000.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp94.000.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.320.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp998.000.000 dan Rp64.139.000.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan Non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2xx1 adalah sebesar Rp1.026.000.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp39.331.000.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(38.305.000.000). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp32.000.000 dan dan defisit Rp(300.000.000) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(38.573.000.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2xx0 adalah sebesar Rp39.631.440.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(38.573.000.000) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp63.080.560.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2xx1 adalah senilai Rp64.139.000.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2xx1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2xx1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

< ESELON 1 >
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/
31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2xx1			TA 2xx0
		ANGGARAN	REALISASI	% thd Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.500.000.000	1.440.000.000	96,00	1.300.000.000
Jumlah Pendapatan		1.500.000.000	1.440.000.000	96,00	1.300.000.000
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	14.000.000.000	13.800.000.000	98,57	12.800.000.000
Belanja Barang	B.4	25.600.000.000	25.400.000.000	99,22	24.700.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	400.000.000	400.000.000	100,00	280.000.000
Jumlah Belanja Operasi		40.000.000.000	39.600.000.000	99,00	37.780.000.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	12.000.000.000	11.800.000.000	98.33	6.000.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	4.600.000.000	4.400.000.000	95.65	3.000.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	3.600.000.000	3.500.000.000	97.22	2.100.000.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	1.200.000.000	1.160.000.000	96.67	800.000.000
Belanja Modal Lainnya	B.10	800.000.000	640.000.000	80.00	560.000.000
Jumlah Belanja modal		22.200.000.000	21.500.000.000	96.85	12.460.000.000
JUMLAH BELANJA		62.200.000.000	61.100000.000	98.23	50.240.000.000

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka UO,

Nama Penandatanganan

.....

< ESELON 1 >
NERACA

PER 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	40.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	12.000.000	4.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	80.000.000	36.000.000
Piutang PNB	C.4	240.000.000	220.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	144.000.000	96.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjual Ansuran	C.6	48.000.000	38.400.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	C.7	(9.000.000)	(17.720.000)
Belanja Dibayar Dimuka	C.8	1.200.000.000	400.000.000
Persediaan	C.9	5.400.000.000	2.800.000.000
Jumlah Aset Lancar		7.155.000.000	3.576.680.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	72.000.000	180.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	24.000.000	100.800.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.12	(2.000.000)	(14.040.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		94.000.000	266.760.000
ASET TETAP			
Tanah	C.13	24.200.000.000	12.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.14	8.524.000.000	4.200.000.000
Gedung dan Bangunan	C.15	31.980.000.000	28.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	1.360.000.000	200.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	420.000.000	360.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.18	1.500.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(11.416.000.000)	(9.136.000.000)
Jumlah Aset Tetap		56.568.000.000	35.624.000.000
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	720.000.000	80.000.000
Aset Lain-Lain	C.21	780.000.000	440.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(180.000.000)	(120.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		1.320.000.000	400.000.000
JUMLAH ASET			
		65.137.000.000	39.867.440.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	40.000.000	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	158.000.000	36.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	800.000.000	200.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		998.000.000	236.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN			
		998.000.000	236.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	64.139.000.000	39.631.440.000
JUMLAH EKUITAS			
		64.139.000.000	39.631.440.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		65.137.000.000	39.867.440.000

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka UO,

Nama Penandatangan

.....

III. LAPORAN OPERASIONAL

**< ESELON 1 >
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/
30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.026.000.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.026.000.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	13.880.000.000	-
Beban Persediaan	D.3	10.000.000.000	-
Beban Jasa	D.4	2.200.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	800.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.800.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.700.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	400.000.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.340.000.000	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	11.000.000	-
Beban Lain-Lain	D.11	200.000.000	-
JUMLAH BEBAN		39.331.000.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(38.305.000.000)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.12	48.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(6.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(10.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		32.000.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(38.273.000.000)	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.13	40.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas		(120.000.000)	-
Beban Persediaan		(220.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(38.573.000.000)	-

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka UO,

Nama Penandatanganan

.....

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

< ESELON 1 >
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/
 31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
EKUITAS AWAL	E.1	39.631.440.000	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(38.573.000.000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	200.000.000	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	600.000.000	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	300.000.000	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	(60.000.000)	-
JUMLAH LAIN-LAIN		1.040.000.000	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		62.040.560.000	-
EKUITAS AKHIR	E.7	64.139.000.000	39.631.440.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Ka UO,

Nama Penandatanganan

.....

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis <Eselon 1 >

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis < Eselon 1 > didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan.

< Eselon 1 > mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis, dan administrasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Pertahanan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan Kementerian Pertahanan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, < Eselon 1 > berkomitmen dengan visi "*mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara yang berkualitas.*" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah- langkah strategis sebagai berikut

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Pertahanan. Membina secara efektif Kementerian Pertahanan dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2xx1 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh <Eselon 1>. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Pertahanan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan <Eselon 1> Tahun 2xx1 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah < Eselon 1 > yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan

Jumlah entitas akuntansi di lingkup < Eselon 1 > Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 7 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode es I	Entitas	Jumlah Jenis KEwenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	02	Unit Organisasi Eselon 1	1	-	-	-	1
2	02	Wilayah/Kukotama A		1	-	-	1
3	02	Wilayah/Kukotama B		1	-	-	1
4	02	Wilayah/Kukotama C		1	-	-	1
5	02	Wilayah/Kukotama D		1	-	-	1
6	02	Wilayah/Kukotama E		1	-	-	1
7	02	Wilayah/Kukotama F		1	-	-	1
Jumlah			1	6	-	-	7

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

< Eselon 1 > menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor < Eselon 1 > dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2xx1 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh < Eselon 1 > yang merupakan entitas pelaporan dari < Eselon 1 >, Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah < Eselon 1 > adalah sebagai berikut :

Pendapatan
LRA

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan **(2) Pendapatan LO**

LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan LO pada < Eselon 1 > adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proposional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.(*Kementerian Pertahanan agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan LO sesuai karakteristik, pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya)

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta

rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalitas tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
jangka
panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lainnya
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa Aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, belanja yang masih harus dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan pertimbangan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Pertahanan dan Bendahara umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap **(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Kontruksi dalam pekerjaan (KDP)
 - c. Asep tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi (10)
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah megimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian

Laporan Keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward* accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Akuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp 1.440.000.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 adalah sebesar Rp1.440.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000. Pendapatan lingkup Deputi Administrasi BAPK terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain- lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA.2xx1

Uraian	2xx1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Pendapatan Jasa	1.400.000.000	1.360.000.000	97.14
Pendapatan Lain-Lain	100.000.000	80.000.000	80.00
Jumlah	1.500.000.000	1.440.000.000	96.00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 10,77% persen dibandingkan TA 2xx0. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi < Eselon 1 >. Selain itu, Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 33,33% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi pendapatan TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian	Realisasi T.A 2xx1	Realisasi T.A 2xx0	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	1.360.000.000	1.240.000.000	9.68
Pendapatan Lain-Lain	80.000.000	60.000.000	33.33
Jumlah	1.440.000.000	1.300.000.000	10.77

Realisasi Belanja
Negara
Rp61.100.000.000

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2xx1 adalah sebesar Rp61.100.000.000 atau 98,23% dari anggaran belanja sebesar Rp62.200.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2xx0 adalah sebagai berikut:

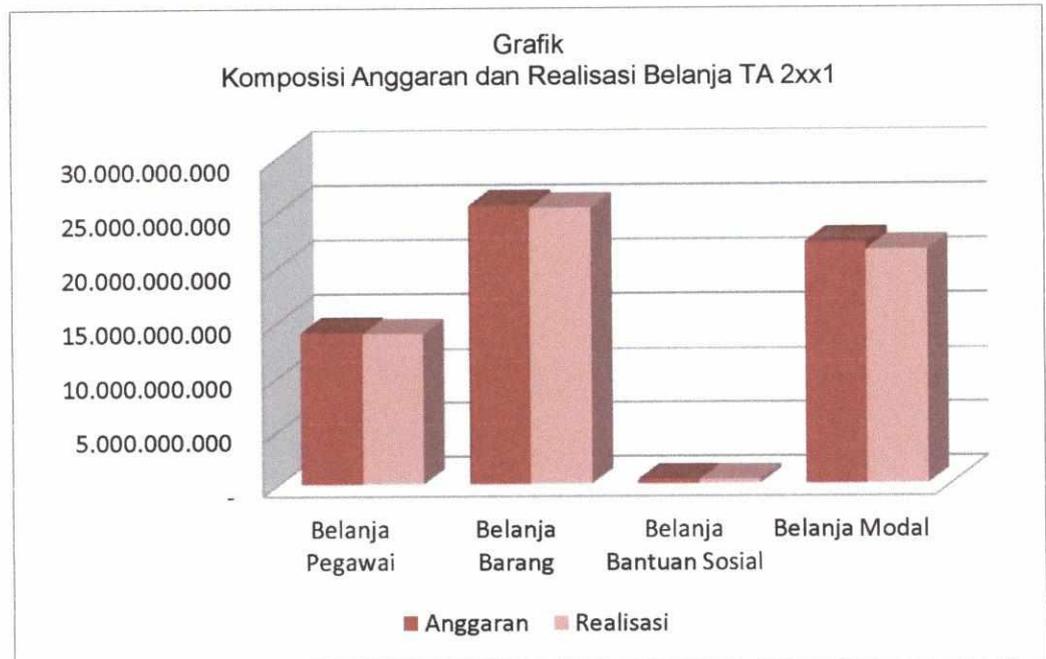
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2xx1

Uraian	2xx1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	14.000.000.000	13.900.000.000	99.29
Belanja Barang	26.600.000.000	25.400.000.000	99.22
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000	100
Belanja Modal	22.200.000.000	21.500.000.000	96.85
Total Belanja Kotor	62.200.000.000	61.200.000.000	98.39
Pengembalian Belanja	-	(100.000.000)	0
Jumlah	62.200.000.000	61.100.000.000	98.23

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2xx1 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	2xx1		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pengembangan dan Penyusunan Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis	25.000.000.000	24.800.000.000	99.20
Manajemen dan Dukungan TI di Bidang Pelaporan	30.000.000.000	29.300.000.000	97.67
Penyusunan Laporan Keuangan	7.200.000.000	7.000.000.000	97.22
Total Belanja	62.200.000.000	61.100.000.000	98.23

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2xx0, Realisasi Belanja TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 21,62% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2xx1
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian	Realisasi TA.2xx1	Realisasi TA.2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	13.800.000.000	12.800.000.000	7,81
Belanja Barang	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	280.000.000	42,88
Belanja Modal	21.500.000.000	12.460.000.000	72,55
Jumlah	61.100.000.000	50.240.000.000	21,62

B.3 Belanja Pegawai

Rp. 13.800.000.000

Realisasi Belanja Pegawai TA 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp13.800.000.000 dan Rp12.800.000.000.

Realisasi belanja TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 7,81 persen dan TA 2xx0. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi bagi pegawai Non PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi TA. 2xx1	Realisasi TA. 2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunj.PNS	10.000.000.000	9.600.000.000	4,17
Belanja Gaji dan Tunj. Non PNS	1.800.000.000	1.400.000.000	28,57
Belanja Honorarium	1.200.000.000	1.100.000.000	9,09
Belanja Lembur	600.000.000	500.000.000	20,00
Belanja Vakasi	300.000.000	260.000.000	15,38
Jumlah Belanja Kotor	13.900.000.000	12.860.000.000	8,09
Pengembalian Belj. Pegawai	(100.000.000)	(60.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	13.800.000.000	12.800.000.000	7,81

Belanja Barang Rp
25.400.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar 25.400.000.000 dan 24.700.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2xx1 mengalami kenaikan 2.83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2xx0. Hal ini antara lain disebabkan oleh biaya perjalanan dinas peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan peserta sepanjang tahun 2xx1

Perbandingan Belanja Barang TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi TA 2xx1	Realisasi TA 2xx0	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional	10.400.000.000	3.900.000.000	166,67
Belanja Barang Non Operasional	2.000.000.000	1.940.000.000	3,09
Belanja Jasa	3.000.000.000	2.960.000.000	1,35
Belanja Pemeliharaan	800.000.000	5.920.000.000	(86,49)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.800.000.000	7.600.000.000	(10,53)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	2.400.000.000	2.380.000.000	0,84
Jumlah Belanja Kotor	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	25.400.000.000	24.700.000.000	2,83

Belanja Bantuan
Sosial
Rp 400.000.000

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp280.000.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 42,86% dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx0. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 dan TA 2xx0

URAIAN	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi	60,000,000	30,000,000	100.00
Belanja Bantuan sosial Untuk Jaminan Sosial	120,000,000	50,000,000	140.00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	220,000.000	200,000,000	10.00
Jumlah	400,000,000	280,000,000	42.86

Belanja Modal Tanah
Rp11.800.000.000

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar 11.800.000.000 dan Rp6.000.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 96,67 persen dibandingkan TA 2xx0. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan 2xx0

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2xx1	REALISASI T.A. 2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	9.200.000.000	4.400.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	920.000.000	440.000.000	109,09
Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah	360.000.000	240.000.000	50,00
Belanja Modal pengurusan dan Pematangan Tanah	800.000.000	600.000.000	33,33
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	520.000.000	320.000.000	62,50
Jumlah Belanja Kotor	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	11.800.000.000	6.000.000.000	96,67

Belanja Modal dan
Peralatan dan Mesin
Rp. 4.400.000.000

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2xx1 adalah sebesar Rp4.400.000.000, mengalami kenaikan sebesar 46,67 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja peralatan dan mesin TA 2xx0 sebesar Rp3.000.000.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi T.A. 2xx1	Realisasi Ta.2xx0	Naik (Turun) %
Peralatan	2.400.000.000	1.600.000.000	50,00
Mesin	2.000.000.000	1.400.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	4.400.000.000	3.000.000.000	46,67

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp 3.500.000.000

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000.000 dan Rp2.100.000.000. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan gedung tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Perbandingan Realisasi Gedung dan Bangunan TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2xx1	Realisasi T.A 2xx0	Naik (Turun)
Gedung Tempat Kerja	3.500.000.000	2.100.000.000	40,00
Jumlah Belanja Kotor	3.500.000.000	2.100.000.000	40,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.500.000.000	2.100.000.000	40,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp1.160.000.000

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.160.000.000 dan Rp800.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan Realisasi Belanja

Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis

Perbandingan Realisasi Belanja modal TA 2xx1 dan TA 2xx0

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2xx1	T.A 2xx0	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Jaringan	1.040.000.000	720.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	120.000.000	80.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	1.160.000.000	800.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.160.000.000	800.000.000	45,00

Belanja Modal
Lainnya
Rp 640.000.000

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp640.000.000 dan Rp560.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 13 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp40.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

(Jabatan Bendahara Pengeluaran harus dengan Surat Keputusan)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca, Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
Rekening Bank	15.000.000	-
Uang Tunai	25.000.000	-
Jumlah	40.000.000	-

Kas di Bendahara
Penerima
Rp. 12.000.000

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

(Jabatan Bendahara Penerimaan harus dengan Surat Keputusan)

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar masing-masing Rp12.000.000 dan Rp4.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 80.000.000

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp80.000.000. dan Rp36.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Saldo	
	TH 2xx1	TH 2xx0
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	2.000.000	1.000.000
Pajak PPh yang belum disetor	6.000.000	2.500.000
Honor kegiatan yang belum dibagikan	72.000.000	32.500.000
Jumlah	80.000.000	36.000.000

Piutang Bukan
Pajak
Rp 240.000.000

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp240.000.000. dan Rp220.000.000. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0
Piutang PNPB	200.000.000	190.000.000
Piutang Lainnya	40.000.000	30.000.000
Jumlah	240.000.000	220.000.000

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp144.000.000

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp144.000.000 dan Rp96.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	KuKotama A	48,000,000	-
2	KuKotama B	-	12,000,000
3	KuKotama C	36,000,000	36,000,000
4	KuKotama D	24,000,000	24,000,000
5	KuKotama E	12,000,000	-
6	KuKotama F	24,000,000	24,000,000
	Jumlah	144.000,000	96,000,000

Bagian Lancar
TPA
Rp48.000.000

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp48.000.000 dan Rp38.400.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

No	Debitur per Satker	TH 2xx1	TH 2xx0
1	Satker A	6,000,000	6,000,000
2	Satker B	7,200,000	-
3	Satker C	4,800,000	4,800,000
4	Satker D	6,000,000	6,000,000
5	Satker E	-	2,400,000
Jumlah		21,000,000	19,200,000

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang JK Pendek
Rp(9.000.000)

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp (9.000.000) dan Rp(17.720.000).

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
PIUTANG BUKAN PAJAK			
Lancar	200.000.000	0,50 %	1.000.000
Kurang Lancar	40.000.000	10%	4.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	240.000.000		5.000.000
BAGIAN LANCAR TP/TGR			
Lancar	120.000.000	0,50 %	600.000
Kurang Lancar	24.000.000	10%	2.400.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	144.000.000		3.000.000

BAGIAN LANCAR TPA			
Lancar	40.000.000	0,50 %	200.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	48.000.000		1.000.000
Jumlah Penyisihan Piutang	432.000.000		9.000.000

Belanja Dibayar

Dimuka

Rp1.200.000.000

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Di bayar di Muka per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp1.200.000.000 dan Rp400.000.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Di bayar di Muka

Jenis	THN 2xx1	THN 2xx0
Pembayaran Internet	120.000.000	120.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	280.000.000	280.000.000
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	800.000.000	-
Jumlah	1.200.000.000	400.000.000

Persediaan

Rp5.400.000.000

C.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp5.400.000.000 dan Rp2.800.000.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2xx1	TH 2xx0
Barang Konsumsi	2.800.000.0	1.500.000.0
Barang untuk Pemeliharaan	1.200.000.0	600.000.000
Suku Cadang	680.000.000	360.000.000
Persediaan Lainnya	720.000.000	340.000.000
Jumlah	5.400.000.000	2.800.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.000.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Tagihan TP/TGR
Rp72.000.000

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp 72.000.000. dan Rp180.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	Ku Kotama A	24.000.000	-
2	Ku Kotama B	-	24.000.000
3	Ku Kotama C	18.000.000	72.000.000
4	Ku Kotama D	12.000.000	48.000.000
5	Ku Kotama E	6.000.000	-
6	Ku Kotama F	12.000.000	36.000.000
Jumlah		72.000.000	180.000.000

TPA Rp24.000.000

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp24.000.000 dan Rp100.800.000. Rincian TPA untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian TPA

No	Nama	TH 2xx1	TH 2xx0
1	Ku Kotama A	6.000.000	24.000.000
2	Ku Kotama B	2.400.000	
3	Ku Kotama C	9.500.000	19.200.000
4	Ku Kotama D	6.000.000	24.000.000
5	Ku Kotama F	-	33.600.000
Jumlah		24.000.000	100.800.000

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(2.000.000) dan Rp(14.040.000). Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Ganti Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 6.000.000 (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	60.000.000	0.50%	300.000
Kurang Lancar	12.000.000	10%	1.200.000
Diragukan		50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	72.000.000		1.500.000
Tagihan PA			
Lancar	20.000.000	0.50%	100.000
Kurang Lancar	4.000.000	10%	400.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	24.000.000		500,000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	96.000.000		2.000,000

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp(2.000.000)

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Unit Organisasi Eselon 1 per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp24.200.000.000 dan Rp12.000.000.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2xx0	Rp	12.000.000.000
Mutasi Tambah	Rp	
Pembelian	Rp	11.800.000.000
Hibah	Rp	400.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2xx1	Rp	24.200.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	Rp	24.200.000.000

Tanah
Rp24.200.000.000.

Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di W. Buah Merah KM 7, pada Kantor <Ku Kotama>, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga

Peralatan dan Mesin
Rp8.524.000.000

C.14 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp8.524.000.000 dan Rp2.400.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2xx0	Rp	4.200.000.000
Mutasi Tambah	Rp	
Pembelian	Rp	4.400.000.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	100.000.000
Mutasi Kurang	Rp	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(200.000.000)
Penghapusan	Rp	(300.000.000)
Koreksi Nilai		(276.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	Rp	8.524.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	Rp	(1.560.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	Rp	6.964.000.000

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian berupa

Rincian Peralatan dan Mesin

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Komputer Unit	400.000.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000.000
Jumlah		4.400.000.000

- b. Penambahan alat rumah tangga melalui hibah sebesar Rp600.000.000.
- c. Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah dihentikan penggunaannya senilai Rp100.000.000.
- d. Pengurangan melalui penghentian alat pemancar dari penggunaannya sebesar Rp200.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke Aset Lain-Lain.
- e. Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp300.000.000. merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor.
- f. Koreksi nilai karena kesalahan pencatatan senilai Rp276.000.000. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp31.980.000.000

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp31.980.000.000 dan Rp28.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2xx0	28.000.000.000
Mutasi tambah	
Pembangunan Gedung	3.500.000.000
Koreksi Nilai	600.000.000
Mutasi Kurang	0
Koreksi Nilai	(120.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	31.980.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(9.500.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	22.480.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan dari pengadaan gedung dan bangunan senilai Rp3.500.000.000 untuk pembangunan dan renovasi unit

kantor kerja.

- b. Penambahan yang disebabkan karena koreksi nilai sebesar Rp600.000.000.
- c. Pengurangan berupa koreksi pencatatan pada gedung tempat tinggal sebesar Rp120.000.000.
- d. Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk mushola yang dibangun secara swadaya oleh pegawai Kantor <satker A> lingkup Wilayah/Kotama A.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp1.360,000.000

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.360.000.000 dan Rp200.000.0000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2xx0	200.000.000
Mutasi tambah	
Penambahan Jaringan Informasi Teknologi	1.160.000.000
Mutasi Kurang	0
Koreksi Nilai	
Saldo per 31 Desember 2xx1	1.360.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(184.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	1.176.000.000

Transaksi penambahan jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal senilai Rp1.160.000.000 untuk pengembangan jaringan teknologi informasi di lingkup Unit Organisasi Eselon 1.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Tetap
Lainnya Rp
420.000.000

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp420.000.000 dan Rp360.000.000. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2xx1 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp80.000.000 berupa koleksi buku perpustakaan sedangkan mutasi kurang berasal dari koreksi nilai sebesar Rp20.000.000.

Saldo per 31 Desember 2xx0	360.000.000
Mutasi tambah	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	80.000.000
Mutasi Kurang	0
Koreksi Nilai	(20.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	420.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(172.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	248.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp1.500.000.000

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(11.416.000.000
)

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing Rp(11.416.000.000) dan Rp(9.136.000.000). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2xx1, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 8.524.000.000	Rp 1.560.000.000	Rp 6.964.000.000
2	Gedung dan Bangunan	Rp 31.980.000.000	Rp 9.500.000.000	Rp 22.480.000.000
3	Jalan, irigasi dan Jaringan	Rp 1.360.000.000	Rp 184.000.000	Rp 1.176.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 460.000.000	Rp 172.000.000	Rp 288.000.000
Akumulasi Penyusutan		Rp 42.324.000.000	11.416.000.000	Rp 30.908.000.000

Aset Tak Berwujud
Rp720.000.000

C.20 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2xx1 dan 31 Desember 2xx0 adalah Rp720.000.000 dan Rp80.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2xx1 adalah sebagai berikut

Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	R 600.000.000
2	ATB Lainnya	R 120.000.000
Jurnal Nilai Perolehan Per 31 Desember		R 720.000.000
Amortisi ATB s.d 31 Desember 2xx1		R (80.000.000)
Jumlah		R 640.000.000

Aset Lain-Lain
Rp 780.000.000

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp780.000.000 dan Rp440.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Unit Organisasi Eselon 1 serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2xx0	440.000.000
Mutasi tambah	
- Reklasifikasi dari aset tetap	500.000.000
Mutasi Kurang	
- Penggunaan Kembali BMN yang telah dihentikan	(100.000.000)
- Penghapusan BMN	(60.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	780.000.000
Akumulasi Penyusutan	(100.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	680.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya berupa .:

Rincian Aset Lain-Lain

No	Peralatan dan Me sin	Nilai
1	Masin	200.000,000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	300,000,000
Jumlah		500,000,000

- b. Pengurangan melalui reklasifikasi ke peralatan dan mesin yang merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp100.000.000.
- c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp60.000.000 yang merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor.

Rincian Aset berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp (180.000.000)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(180.000.000) dan Rp(120.000.000). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisi Aset LAInnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwuiud			
1	Software Komputer	Rp 600,000,000	Rp 70,000,00	Rp 530,000,
2	ATB Lainnya	Rp 120,000,000	Rp 10,000,00	Ro 110,000,
	Jumlah	Rp 720,000,000	Rp 80,000,00 0	Rp 640,000, 000
B	Aset Lainnya	Rp 780,000,000	Rp 100,000,0	Rp 680,000,
	Jumlah	Rp 780,000,000	Rp 100,000,0	Rp 680,000,
	Total	Rp 1,500,000,000	Rp 180,000,0 00	Rp 1.320,00 0,000

Uang Muka dari
KPPN
Rp 40.000.000

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Wilayah/Kotama adalah sebagai

Rincian Uang Muka dari KPP

No	Uraian	Tahun 2015
1	<Wilayah/Kotama A>	15,000,000
2	<Wilayah/Kotama D>	20,000,000
3	<Wilayah/Kotama F>	5,000,000
	Jumlah	40,000,000

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp 158.000.000

C.24. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing masing sebesar Rp158.000.000. dan Rp36.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua betas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Unit Organisasi

Eselon 1 per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian		Jumlah
1	Belanja Pegawai yang belum dibayarkan	Rp	80,000,000
2	Belanja Barang yang belum dibayarkan	Rp	72,000,000
3	Belanja Lainnya yang Belum dibayarkan	Rp	6,000,000
Total		Rp	158,000,000

Pendapatan

Diterima dimuka

Rp800.000.000

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 sebesar Rp800.000.000 dan Rp200.000.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	600.000.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah	75.000.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	125.000.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Total	800.000.000	

Ekuitas

Rp64.139.000.000

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp64.139.000.000 dan Rp39.631.440.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
RP 1.026.000.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar Rp1.026.000.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2xx1 dan 2xx0

Jenis Pendapatan	TH 2xx1	TH 2xx0	% KEN/PEN
Pendapatan Jasa	892.000.000	-	-
Pendapatan Lain-lain	134.000.000	-	-
Jumlah	1.026.000.000	-	-

Pendapatan Jasa adalah merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan pendapatan lain-lain-LO merupakan pengembalian beban yang berasal dari transaksi tahun 2xx0.

Beban Pegawai
Rp13.880.000.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp13.880.000.000 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Gaji	9.200.000.000	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	3.780.000.000	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	1.500.000.000	-	-
Beban Lembur	600.000.000	-	-
Jumlah	13.880.000.000		

Beban Persediaan
Rp10.000.000.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000.000 dan 0. Beban Persediaan

merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun)
Behan Persediaan Konsumsi	7.200.000.000	-	-
Behan Persediaan Bahan	800.000.000	-	-
Behan Persediaan Suku Cadang	1.600.000.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	400.000.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	10.000.000.000	-	-

Beban Jasa

Rp 2.200.000.000

D.4 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp2.200.000.000 dan Rp0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Jasa Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Langganan Dava dan	260.000.000	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	124.000.000	-	-
Beban Jasa Konsultan	400.000.000	-	-
Beban Jasa Profesi	1.364.000.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	52.000.000	-	-
Jumlah	2.200.000.000	-	-

Beban

Pemeliharaan

Rp800.000.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp800.000.000 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian jenis beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan	480.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan	280.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	40.000.000	-	-
Jumlah	800.000.000	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp6.800.000.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp6.800.000.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Peralatan Dinas TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3.700.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	1.300.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	400.000.000	-	-
Jumlah	6.800.000.000	-	-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp 2.700.000.000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp2.700.000.000 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada	400.000.000	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	1.400.000.000	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pemda	900.000.000	-	-
Jumlah	2.700.000.000	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp400.000.000

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	60.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	120.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	220.000.000	-	-
Jumlah	400.000.000	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp 2.340.000.000

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp2.340.000.000 dan Rp0. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Para latan dan Mesin	560.000.000	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.500.000.000	-	-
Beban Penyusutan Jalan, irigasi, Jaringan	136.000.000	-	-

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	84.000.000	-	-
Jumlah Penyusutan	2.280.000.00	-	-
Beban Amortisasi Aplikasi	40.000.000	-	-
Beban Amortisasi ATB lainnya	20.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	60.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan	2.340.000.000	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp11.000.000

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp11.000.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	9.000.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	2.000.000	-	-
Jumlah	11.000.000	-	-

Beban Lain-Lain
Rp200.000.000

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-Lain untuk Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan	120,000,000	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan	60,000,000	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap	20,000,000	-	-
Jumlah	200,000,000	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp32.000.000

D.12 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Peralatan dan Mesin	48.000.000	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Peralatan dan Mesin	(6.000.000)	-	-
Defisit Selisih Kurs	(10.000.000)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	32.000.000	-	-

Defisit Pos Luar
Biasa
Rp(300.000.000)

D.13 Pos-Pos Luar Biasa

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun)
Pendapatan PNBPN	40.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas	(120.000.000)	-	-
Beban Persediaan	(220.000.000)	-	-
Jumlah	(300.000.000)	-	-

Pendapatan PNBPN berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan adalah merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 39.631.440.000

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar 39.631.440.000 dan Rp0.

Surplus (Defisit) LO
Rp(38.573.000.000)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah defisit sebesar Rp(38.573.000.000) dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi nilai
persediaan
Rp 200.000.000

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp.200.000.000 dan Rp0, Rincian untuk tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Kosumsi	100.000.000
2. Suku Cadang	30.000.000
3. Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	60.000,000
4. Barang Persediaan Lainnya	10.000,000
Jumlah	200.000.000

Koreksi Aset Tetap
Rp600.000.000

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp600.000.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincia Atas Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
1. Bangunan Tempat Kerja	550.000.000
2. Bangunan Tempat Tinggai	50.000.000
Jumlah	600.000.000

Koreksi Atas Beban
Rp300.000.000

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat	300.000.000
Jumlah	300.000.000

Koreksi Atas
Pendapatan
Rp(60.000.000)

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(60.000.000) dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2xx1 adalah sebagai berikut

Tabel 52
Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Pendapatan Jasa	40.000.000
Pendapatan Lainnya	20.000.000
Jumlah	60.000.000

Ekuitas Akhir
Rp64.139.000.000

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar 64.139.000.000 dan Rp 39.631.440.000.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2011 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala <Eselon 1 > telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor: Kep/xxx/xxx/xxxx Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Unit Organisasi Eselon 1 pada tanggal 05 Juli 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Satker A	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Meini
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Fajar
	Bendahara	Yessy	Martha
Satker B	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Okto
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Utama	Augusta
	Bendahara	Yanuraga	Jumina
Satker F	Kuasa Pengguna Anggaran	Fathin	Made
	Pejabat Pembuat Komitmen	Aydin	Sagita
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Zaflan	Koming
	Bendahara	Rizvan	Ayunda

< Eselon 1 >
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisi, Akumulasi Penyusutan /Amortisi
Dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 20xx1

NO	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny		Beban Peny Tahun 20xx1	Akm Peny		Nilai Buku Per 31-12-20xx1
				Per 31-12-20xx0			Per 31-12-20xx1		
A	Tanah								
1	Tanah		24.200.000.000	-	-	-	-	-	24.200.000.000
	Jumlah		24.200.000.000	-	-	-	-	-	24.200.000.000
B	Peralatan dan Mesin								
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	920.000.000	74.000.000	38.000.000	112.000.000	808.000.000		
2	Alat Kantor	5	2.600.000.000	200.000.000	100.000.000	300.000.000	2.300.000.000		
3	Alat Rumah Tangga	5	3.600.000.000	484.000.000	300.000.000	784.000.000	2.816.000.000		
4	Alat Komunikasi	5	166.000.000	25.000.000	12.500.000	37.500.000	128.500.000		
5	Komputer Unit	4	800.000.000	150.000.000	76.000.000	226.000.000	574.000.000		
6	Peralatan Komputer	4	334.000.000	62.000.000	31.000.000	93.000.000	241.000.000		
7	Peralatan Olah Raga	3	104.000.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000	96.500.000		
	Jumlah		8.524.000.000	1.000.000.000	560.000.000	1.560.000.000	6.964.000.000		6.964.000.000
C	Gedung dan Bangunan								
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	15.120.000.000	3.888.000.000	650.000.000	4.538.000.000	10.582.000.000		
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	16.860.000.000	4.112.000.000	850.000.000	4.962.000.000	11.898.000.000		
	Jumlah		31.980.000.000	8.000.000.000	1.500.000.000	9.500.000.000	22.480.000.000		22.480.000.000
D	Jaringan, Irigasi dan jalan								
1	Jaringan Listrik	40	168.000.000	4.500.000	12.952.000	17.452.000	150.548.000		
2	Jaringan Telepon	20	1.192.000.000	43.500.000	123.048.000	166.548.000	1.025.452.000		
	Jumlah		1.360.000.000	48.000.000	136.000.000	184.000.000	1.176.000.000		1.176.000.000
E	Aset Tetap Lainnya								
1	Barang Bercorak Kesenian	4	300.000.000	88.000.000	84.000.000	172.000.000	128.000.000		
2	Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	120.000.000	-	-	-	120.000.000		
	Jumlah		420.000.000	88.000.000	84.000.000	172.000.000	248.000.000		248.000.000
F	Konstruksi dalam Pengerjaan								
1	KDP Bangunan	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000		
	Jumlah		1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000		1.500.000.000
G	Aset Lainnya								
1	Aset Tidak Berwujud*	-	720.000.000	40.000.000	40.000.000	80.000.000	640.000.000		
2	Aset Lai-lain	-	780.000.000	80.000.000	20.000.000	100.000.000	680.000.000		
	Total		69.484.000.000	9.256.000.000	2.340.000.000	11.596.000.000	57.888.000.000		57.888.000.000

*) Amortisasi

TABEL KONTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

No	KDP	Satker	No Kontrak	Nilai Kontrak	% Pynles	Nilai KDP	Sumber Dana
1	Gedung Tempat Kerja	Wilayah/Kotama F	No.21/DA/VII/21015	500.000.000	80%	400.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja	Wilayah/Kotama A	No.05/DA/VI/21015	1.200.000.000	50%	600.000.000	Rupiah Murni
3	Gedung Tempat Tinggal	Wilayah/Kotama F	No.14/DA/VIII/21015	400.000.000	50%	200.000.000	Rupiah Murni
4	Gedung Tempat Tinggal	Wilayah/Kotama D	No.17/DA/XII/21015	312.500.000	80%	250.000.000	Pinj. LN
Jumlah				2.412.500.000		1.450.000.000	

Nama kota, tanggal-bulan-tahun

Ka UO,

Nama Penandatanganan

.....

FORMAT 10

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN DAN HIBAH ESELON 1
UNTUK TRIWULAN/ SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2XX1/30 JUNI 2XX1/30 SEPTEMBER 2XX1/31 DESEMBER 2XX1*)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
: :
ESELON I : :

Kode Lap : LRPE W.01
Tanggal :
Halaman :
Prig.id :

KODE	URAIAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN				%REAL PEND.	
		ESTIMASI PENDAPATAN	TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU	PENGEMBALIAN S.D TRIWULAN INI		JUMLAH NETTO S.D TRIWULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8
I XX	II. IKHTISAR MENURUT MAP						
XXX	PENERIMAANDALAM NEGERI						
XXXX	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
XXXX	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
XXXXXX	Uraian Pendapatan						
	Uraian Pendapatan						
	Uraian Pendapatan						
	Jumlah Penerimaan XXXXXX						
	Jumlah Penerimaan XXXX						
	Jumlah Penerimaan XXX						
	Jumlah Penerimaan XX						
	JUMLAH Penerimaan Dalam Negeri						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH						
XXXXXX	II. IKHTISAR MENURUT SATKER						
	SATKER						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH						

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH ESELON 1
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2XX1/30 JUNI 2XX1/30 SEPTEMBER 2XX1/31 DESEMBER 2XX1*)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
 ESELON I :

Kode Lap : LPPE W.02
 Tanggal :
 Halaman :
 Prtg id :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			%REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
I XX	I. IKHTISAR MENURUT MAP					
XXX	PENERIMAANDALAM NEGERI					
XXXX	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
XXXX	PENDAPATAN PNBP LAINNYA					
XXXX	URAIAN PENDAPATAN					
XXXXXX	URAIAN PENDAPATAN					
	URAIAN PENDAPATAN					
	Jumlah Penerimaan XXXXXXX					
	Jumlah Penerimaan XXXXX					
	Jumlah Penerimaan XXX					
	Jumlah Penerimaan XX					
	JUMLAH Penerimaan Dalam Negeri					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					
XXXXXX	II. IKHTISAR MENURUT WILAYAH					
	WILAYAH					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 BELANJA ESELON MELALUI KPPN
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2011/30 JUNI 2011/30 SEPTEMBER 2011/31 DESEMBER 2011*)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 ESELON I

Kode Lap : LRBE.W.01
 Tanggal :
 Halaman :
 Prtg :

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIWULAN INI	JUMLAH S.D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S.D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	10 (4-6)
I	IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA							
X	URAIAN SUMBER DANA							
XX	URAIAN CARA PENARIKAN							
XX	URAIAN FUNGSI							
XX	URAIAN SUB FUNGSI							
XX	Uraian Program							
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI XX							
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX							
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX							
	JUMLAH BELANJA							
II.	IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH							
XXXX	URAIAN WILAYAH							
	JUMLAH BELANJA							
III.	KHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK							
XX XXXX	URAIAN KELOMPOK BELANJA							
XXXXXX	Uraian Sub Kelompok Belanja							
	Uraian Belanja							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA XXXX							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX							
	JUMLAH BELANJA							

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 13

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA ESELON I
UNTUK TRIWULAN/ SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2XX1/30 JUNI 2XX1/30 SEPTEMBER 2XX1/31 DESEMBER 2XX1*)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
ESELON I :

Kode Lap : LRBE W.01
Tanggal :
Halaman:
Prig id :

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			%REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S.D TRIWULAN YANG LALU	6		
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8 (7 : 4)	9 (4 - 7)
I	TRANSAKSI MENURUT SUMBER DANA							
X	URAIAN SUMBER DANA							
XX	URAIAN CARA PENARIKAN							
XX	URAIAN FUNGSI							
XX	URAIAN SUB FUNGSI							
XX	Uraian Program							
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI XX.XX							
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX							
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX							
	JUMLAH BELANJA							
II.	IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH							
XXXX	URAIAN WILAYAH							
	JUMLAH BELANJA							
III.	IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK							
	URAIAN KELOMPOK BELANJA							
XX XXXX	Uraian Sub Kelompok Belanja							
XXXXXXXX	Uraian Belanja							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA XXXX							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX							
	JUMLAH BELANJA							

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 14

NERACA PERCOBAAN
ESELON 1
PER 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2XX1*)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
ESELON 1 :

Kode Lap : NPSAIE1
Tanggal :
Halaman :
Prig id :

KODE TRANSAKSI	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	113712	Piutang dari KPPN		XX
0	212511	Utang kepada KPPN	XX	
3	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri		XX
3	511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	XX	
3	511169	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	XX	
3	511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/POLRI	XX	
3	511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/POLRI	XX	
			XXX	XXX

*) coret yang tidak perlu

2. Laporan Ekstra

UO :.....

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
Halaman :1
Kode Lap :LBSEKT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2XX1		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2XX1	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL									

Jakarta,..... 2xx1

Penanggung Jawab UAPPB-E1

Nama Penandatanganan
.....

4. Lap Barang Bersejarah

UO :.....

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 BARANG BERSEJARAH RINCIAN
 PER KELOMPOK BARANG TAHUN
 ANGGARAN 2XX1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER		MUTASI		SALDO PER	
		1 JANUARI 2XX1	KUANTITAS	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2XX1	KUANTITAS
KODE	URAIAN			KUANTITAS	KUANTITAS		
1	2	3	4	5	6	7	

Tanggal :
 Halaman :1
 Kode Lap :LBSSKT

Jakarta,..... 2xx1
 Penanggung Jawab UAPPB-E1

Nama Penandatanganan

5. Lap Aset Tak Berwujud

UO :.....

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 ASET TAK BERWUJUD RINCIAN
 PER KELOMPOK BARANG TAHUN
 ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
 Halaman :1
 Kode Lap :LBSTKT

NERACA/KELOMPOK BARANG	AKUN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2XX1		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 1 DESEMBER 2XX1	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL									

Jakarta,..... 2xx1
 Penanggung Jawab UAPPB-E1

Nama Penandatanganan

10. Laporan Persediaan

UO :.....

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
PERSEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	URAIAN	JUMLAH
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Jakarta,..... 2011

Penanggung Jawab UAPPB-E1

Jakarta,..... 2011

Petugas Pengelola Persediaan

Nama Penandatanganan
.....

Nama Penandatanganan
.....

11. Laporan Neraca

UO :.....

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PERTANGGAL 31 DESEMBER 2XX1
TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :
Kode Lap :LBAPKT

KODE	NERACA	JUMLAH
1	URAIAN 2	3
		0
	JUMLAH	0

Jakarta,..... 2xx1

Penanggung Jawab UAPPB-E1

Nama Penandatanganan
.....

14. Laporan Kondisi Barang

LAPORAN KONDISI BARANG PERSEDIAAN
Per <Hari> 31 Desember 2xx1

Eselon 1 :

INSTANSI PUSAT

NAMA UKPB : SATKER BARU

KODE UKPB :

Tanggal :
Halaman :
Kode Lap : LKBT-PKPBI

NO	Sub-Sub Kelompok		NUP	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x.xx.xx.xx	0	-	0	0	0	0
Jumlah								
						0	0	0

Jakarta,.....2xx1

Penanggung Jawab UAPPB-E1

Nama Penandatanganan
.....

FORMAT 16

RENCANA TINDAK ESELON 1
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2xx1

ESELON 1:.....

NOMOR	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN		RENCANA TINDAK	JADUAL PENYELESAIAN
		I	II		
1	2	3	4	6	7

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>
Kepala Unit Organisasi,

Nama Penandatanganan
.....

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ESELON 1 UNIT ORGANISASI
 TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2xx1

BAKU II/PUSKU TNI/DITKU/DISKU ANGKATAN/BIDKUKEM PUSKU KEMHAN:.....

NOMOR	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN		RENCANA TINDAK (SESUAI DENGAN SURAT NOMOR.....2XX1)	JADUAL PENYELESAIAN	PROGRES PER....20XX	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET	
		I	II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Kepala Unit Organisasi,

Nama Penandatanganan

.....

FORMAT 17

DAFTAR REKENING ESELON 1
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/30 JUNI 2xx1/
 30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1 *)

ESELON 1:.....

NOMOR	KANTOR SATUAN KERJA	KEMHAN/UNIT ORGANISASI	BA	JENIS REKENING (GIRO/DEPOSITO)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	REK ATAS NAMA	BANK/ KANTOR POS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) coret yang tidak perlu

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Kepala Unit Organisasi,

Nama Penandatanganan

.....

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 20XX1

ESELON 1:

BAGIAN ANGGARAN

NO	PENDAPATAN BELANJA		REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		REALISASI MENURUT BASIS AKRUAL	DOKUMEN SUMBER
	KODE AKUN	URAIAN		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Kepala Unit Organisasi,

Nama Penandatanganan
.....

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON 1 SEMESTERAN/TAHUNAN TA 20xx			
Kode dan Nama E1 : (.....)			
Kode dan Nama K/L : (.....)			
Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agardiuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA face per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
3. Neraca per 30 Juni/31 Desember 20xx (Format sesuai S-670/PB/2016 khusus LK 2015)			Ada
4. Laporan Operasional per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni/31 Desember 20xx			Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Kelengkapan Kompilasi	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah LK disusun dari Seluruh Satker di Lingkup Eselon I?			Ya
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LPE			Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas			Sama
KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LK sama dengan Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
2. Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LK sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
3. Apakah seluruh akun Neraca pada LK sama dengan Neraca dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama

4.	Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LK samadengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
<i>Apabila terdapat perbedaan, agar diuraikan apa saja yang berbeda dan apa sebabnya pada Lampiran Telaah.</i>				
NERACA PERCOBAAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Tidak Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun dengan uraian "nuli" atau tidak ada uraiannya			Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)		Ya	tidak	Seharusnya
1.	Apakah Akun Aset (1xxxxx) bersaldo (D) (<i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i>)			Ya
2.	Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3.	Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4.	Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)			Ya
5.	Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) (<i>kec. Pengembalian Pendapatan</i>)			Ya
6.	Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
7.	Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) (<i>kecuali beban Penyisihan Piutang</i>)			Ya
8.	Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" (<i>untuk LK Tahunan tidak boleh ada</i>)			Tidak
2.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>kec. DIRB, TVR dan POLR</i>			Tidak
3.	Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)			Tidak
4.	Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) <i>cat: seharusnya 423221</i>			Tidak
5.	Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)			Tidak
6.	Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)			Tidak
7.	Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
8.	Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
9.	Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
10.	Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)			Tidak
Jika Tidak Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Hibah Langsung		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/jasa</i>			Ya
2.	Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?			Ya
3.	Jika ada Akun 111822 (Kas Lainnya di KL dari Hibah) maka ada akun 391131 (Pengesahan Hibah Langsung), atau kebalikannya. <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/jasa</i>			Ya

4. Nilai 111822 lebih kecil atau sama dengan nilai 391131?			Ya
Transfer Masuk dan Transfer Keluar			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah mungkin ada transfer masuk dan transfer keluar?			Ya/tidak
2. Apakah seharusnya transfer masuk sama dengan transfer keluar?			Ya/tidak
3. Apakah seharusnya transfer masuk lebih besar dari transfer keluar?			Ya/tidak
4. Adakah pengawasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk?			Ya
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya
2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya
3. Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAX-BMN?			Ya
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal			
	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
<i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif</i>			
9. Kegiatan Operasional			
	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan			Positif
- Beban Pegawai			Positif
- Beban Persediaan			Positif
- Beban Barang dan Jasa			Positif
- Beban Pemeliharaan			Positif
- Beban Perjalanan Dinas			Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat			Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi			Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Pos/Neg
10. Kegiatan Non Operasional			
	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar			Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif

-	Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
	Keberanan Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdijen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
11.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) + Penghapusan Piutang (Jk. Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
	Pengecekan Antar Laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
12.	Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
	Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?			Ya
	<i>Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Material), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.</i>			
13.	Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
	Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?			Ya
	<i>Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kode kelampak bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah akun "Ekuitas Awal" sama dengan akun "Ekuitas Akhir" LPE Tahun lalu Audited?			Ada
2.	Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
3.	Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap"? Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jumlah kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK			Tidak
NERACA				
	Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Sama
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon			Sama
3.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon			Sama
4.	Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon			Sama
	Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER"? Untuk LK Tahunan Tidak Boleh Ada			Tidak
2.	Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan"?			Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
	<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
-	Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan			Ada

TP/TGR (Neraca)			
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
5. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
6. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
7. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)			Ada

TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Bandingkan Neraca Percobaan dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-W) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan			Sama
2. Aset Tetap			Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			Sama

Bandingkan Neraca Percobaan dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Akumulasi Penyusutan 137xxxx dan 169xxx E-Rekon&LK dengan SIMAK			Sama

Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. Lihat Menu Buku/Daftar-Daftar Transaksi BMN

	sama	tidak	Seharusnya
- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total Nilai Reklas Keluar?			Sama
Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN			
Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya

Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)			Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)			Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)			Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)			Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)			Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)			Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB			Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
3 Kesamaan dengan BAR Kanwil Ditjen Perbendaharaan			Sama

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK Wilayah (Neraca Percobaan)			Sama

Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah/PMK 177/2015 ?			Ya
3. Adakah daftar Saldo kas di bendahara Pengeluaran, Hibah Langsung dan BLU?			Ya
4. Pada Penjelasan Umum apakah sudah ada Klausul: Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015? → Khusus Tahun 2015 saja			Ya
5. Sudahkan menjelaskan nilai Ekuitas Awal pada Penjelasan atas Pos-pos LPE?			Ya
6. Apabila Nilai di Pos-pos LPE besar/material, sudahkan ada penjelasan yang cukup?			Ya

Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya/tidak
2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak selesai?			Ya/tidak
3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di Pengadilan?			Ya/tidak
4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing Wilayah?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"

Disamping hal-hal diatas, dapat juga melakukan telaah membandingkan LRA dengan Laporan Lainnya yang terkait (LO, LPE dan Neraca), misalnya:

- Beban Pegawai di LO = Realisasi Belanja Pegawai + Belanja Pegawai BLU (akun 525111) + selisih Belj Peg Yg Msh hrs Dibayar*
- Beban Perjalanan Dinas di LO = Realisasi Netto akun 524xxx di LRA + selisih Piutang Pengembalian Perjudin + selisih Pengembalian Perjudin yang masih di Bendahara*
- Kenaikan Aset Tetap di Neraca = Realisasi Belanja Modal di LRA - transfer ke luar-penghapusan + Transfer Masuk + Hibah Barang + Perolehan Aset Lainnya + Koreksi*
- dll*

Mengetahui

Pejabat Penyusun
Laporan Keuangan,

Penelaah,

NIP

NIP.

**BERITA ACARA REKONSILIASI
UANG, BARANG DAN JASA PADA PROGRAM
FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
ANTARA
SATKER PENGADAAN UO (.....)
DENGAN
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
PERIODE SEMESTER/TAHUNAN TA 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun 2020 telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus pembiayaan Program *Foreign Military Sales (FMS)* antara Satker Pengadaan UO (.....) dengan Perwira FMS di Amerika Serikat melalui Kabag Malur Ses Baranahan Kementerian Pertahanan.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Satker UO (.....) Semester I TA. 2020.

Hasil Rekonsiliasi ini dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Saldo per 31 Desember 2019 (saldo awal TA.2020).

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO..... dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

2. Jumlah LOA Semester I TA.2020.

Terdapat perbedaan jumlah LOA : sebesar USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO..... dengan jumlah total LOA :sebesar USD.....

3. Jumlah Dana yang diterima s.d 30 Juni 2020.

Terdapat perbedaan jumlah USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO..... dengan jumlah Total USD..... sebesar USD.....

4. Jumlah Pembayaran s.d 30 Juni TA. 2020.

Terdapat perbedaan jumlah USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO..... dengan jumlah Total USD..... sebesar Rp.....,-

5. Jumlah Barang/Jasa diterima (Delivered)

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO..... dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

6. Jumlah Saldo per 30 Juni 2020 (Semester I TA 2020).

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO..... dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 2020
a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat
Kabag Malur Ses Baranahan
Selaku Pejabat Penanggung jawab
Rekonsiliasi Perwira FMS

Nama
.....NRP.....

Mengetahui:
a.n. Pejabat UAPA
Kabag/Kabid.....

Nama
.....NRP.....

Jakarta, 2020
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
.....
Selaku Pejabat Penanggung jawab
Rekonsiliasi UAKPA

Nama
.....NRP.....

Mengetahui:
a.n. Pejabat UPPA Es. 1 UO
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama
.....NRP.....

LAMPIRAN BAR PROGRAM FMS 1

REKONSILIASI UANG, BARANG DAN JASA DARI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
 ANTARA SATKER PENGADAAN : SATKER UO (....) DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT
 PERIODE SEMESTER/TAHUNAN TA 2020

Kementerian Negara/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan
 Eselon-1 :
 Wilayah/Provinsi :
 Kode Satker : Satker
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	LOA		31 DESEMBER 2019		PEMBAYARAN (COLLECTED) s.d 30 JUNI 2020		BARANG & JASA DITERIMA		SALDO		KET	
		JUMLAH	NILAI	USD	RP	USD	RP	USD	RP	USD	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERWIRA FMS												
2	UO												
3	JUMLAH SELISIH												

Keterangan:

- 1 LOA
- 2 LOA
- 3 LOA
- 4 LOA

Jakarta, 2020
 a.n. Pejabat UAPA
 Kabag/Kabid

Jakarta, 2020
 a.n. Pejabat UAPA Es.1 UO
 Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Jakarta, 2020
 a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat
 Kabag Matur Ses Baranahan Selaku Pejabat
 Penanggung jawab Rekonsiliasi Perwira FMS

Jakarta, 2020
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Selaku Pejabat Penanggung jawab
 Rekonsiliasi UAKPA

Nama
 NRP

Nama
 NRP

Nama
 NRP

Nama
 NRP

LAMPIRAN BAR PROGRAM FMS 2

REKONSILIASI DANA YANG DITERIMA PERWIRA FMS DENGAN PEMBAYARAN (COLLECTED)

Kementerian Negara/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan
 Eselon-1 :
 Wilayah/Provinsi :
 Kode Satker : Satker
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	LOA		DANA YANG DITERIMA		PEMBAYARAN (COLLECTED)		KET	
		NO...	USD	USD	RP	USD	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PERWIRA FMS								
2	UO								
3	JUMLAH SELISIH								

Keterangan:

- 1 LOA
- 2 LOA
- 3 LOA
- 4 LOA

Jakarta, 2020
 a.n. Pejabat UAPA
 Kabag/Kabid

Jakarta, 2020
 a.n. Pejabat UAPA Es.1 UO
 Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Jakarta, 2020
 a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat
 Kabag Malur Ses Baranahan Selaku Pejabat
 Penanggung jawab Rekonsiliasi Perwira FMS

Jakarta, 2020
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Selaku Pejabat Penanggung jawab
 Rekonsiliasi UAKPA

Nama
NRP.....

Nama
NRP.....

Nama
NRP.....

Nama
NRP.....

Realisasi Pembayaran Dana Cadangan Alutsista Kemhan dan TNI UAPPA-E1

No	Nomor/Supplier/Deskripsi Kontrak	Tanggal Pekerjaan		Mata Uang	Nilai Kontrak	Pembayaran Melalui Dana Cadangan	Nomor SKP	Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Sisa
		Mulai	Selesai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (7-10)

Jakarta, 2xx1
 Penanggung Jawab UAPPA-E1

Nama Penandatanganan

Kepala
 Pusat Pelaporan dan Pembinaan
 Keuangan Pertahanan,

